



LAPORAN KEGIATAN KOMISI VI DPR RI
DALAM MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023
Tanggal 1 November – 9 Januari 2023
(Masa Sidang Mulai Tanggal 1 November – 15 Desember 2022
Dan Masa Reses Mulai Tanggal 16 Desember – 9 Januari 2023)
Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI
Tanggal 19 September 2022

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 adalah sebagai berikut:

I. FUNGSI LEGISLASI

Terkait dengan fungsi Legislasi, pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan :

1. Rapat Pimpinan dan Rapat Intern Komisi VI DPR RI pada tanggal 1 November 2022 dengan acara Pembahasan Program Kerja Komisi VI DPR RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023. Dan Komisi VI DPR RI menyetujui untuk, antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI akan meratifikasi Presiden RI telah berkirim surat kepada Ketua DPR RI dengan Nomor : R-38/Pres/08/2022 perihal : Rencana Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah RI dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*), dan sesuai keputusan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan

tanggal 3 Oktober 2022 bahwa Komisi VI DPR RI akan melanjutkan pembahasan mengenai rencana kemitraan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Arab melalui mekanisme Rancangan Undang-undang atau Peraturan Presiden pada tanggal 2 November 2022.

2. Rapat internal Komisi VI DPR RI menyetujui rancangan jadwal rapat Komisi VI DPR RI pada masa sidang II Tahun Sidang 2022/2023.
3. Rapat internal Komisi VI DPR RI menyetujui pembentukan panja sebagai berikut
 - a. Panja Distribusi Pupuk
 - b. Panja Distribusi LPG
 - c. Panja Investasi Tambang (izin-izin usaha tambang yang dicabut dan pemanfaatan lahan tambang yang diberikan)
 - d. Panja Konversi Energi Listrik
4. Rapat internal Komisi VI DPR RI menerima masukan anggota komisi VI DPR RI sebagai berikut:
 - a. RDP dengan BUMN Farmasi (Keamanan Produksi Obat dan Kinerja Korporasi).
 - b. RDP dengan BUMN Jasa Raharja.
 - c. Raker dengan Menteri Koperasi untuk koperasi bermasalah.
 - d. Raker dengan Menteri Perdagangan ditambahkan isu terkait kedelai.
 - e. RDP dengan PT Sarinah.
 - f. RDP dengan PT Jasindo terkait produk asuransi gagal panen.

II. FUNGSI ANGGARAN

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, Komisi VI DPR RI tidak ada kegiatan yang terkait dengan Anggaran

III. FUNGSI PENGAWASAN

Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan :

A. RAPAT PIMPINAN DAN RAPAT INTERN KOMISI VI DPR RI

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, berdasarkan hasil Keputusan Rapat Pimpinan DPR RI tanggal 17 Juni 2020 tentang Tata Cara Rapat Komisi/AKD pada masa *New Normal*, rapat-rapat di DPR RI dilaksanakan secara fisik dan virtual. Komisi VI DPR RI telah melaksanakan Rapat Intern Komisi VI DPR RI yaitu :

1. Rapat Intern Panja Distribusi Elpiji Komisi VI DPR RI pada tanggal 7 November 2022, pembahasan mengenai program kerja Panja Distribusi Elpiji, dengan kesimpulan antara lain :
 1. Panja Distribusi Elpiji Komisi VI DPR RI menetapkan Mohamad Hekal., M.B.A sebagai Ketua Panja Distribusi Elpiji Komisi VI DPR RI.
 2. Panja Distribusi Elpiji Komisi VI DPR RI akan memanggil stakeholder antara lain:
 - a. Pengamat;
 - b. YLKI dan BPKN;
 - c. Asosiasi, Distribusi, Agen, dan Pangkalan yang terkait adanya isu tentang penyimpangan dan Distribusi Elpiji yang tidak tepat sasaran.
2. Rapat Intern Panja Investasi Pertambangan Komisi VI DPR RI pada tanggal 7 November 2022, pembahasan mengenai program kerja Panja Investasi Pertambangan, dengan kesimpulan :
 - a. Panja Investasi Pertambangan Komisi VI DPR RI menetapkan Martin Manurung., S.E, M.A sebagai Ketua Panja Investasi Pertambangan Komisi VI DPR RI;
 - b. Panja Investasi Pertambangan Komisi VI DPR RI akan memanggil Pengamat dan Pakar terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja;
 - c. Panja Investasi Pertambangan Komisi VI DPR RI akan memanggil BUMN yang terkait Batubara dan Minerba, yaitu ESDM dan MIND ID;

3. Rapat Intern Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI pada tanggal 8 November 2022, pembahasan mengenai program kerja Panja Transisi Energi ke Listrik, dengan kesimpulan :
 - a. Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI menetapkan M. Sarmuji., S.E, M.Si sebagai Ketua Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI;
 - b. Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI akan memanggil Pengamat, Pakar dan Akademisi dan Pakar Sosiologi yang mengetahui kesiapan masyarakat dalam menghadapi transisi dan mendapat masukan bagi Pemerintah;
 - c. Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI akan mengundang mitra kerja, baik mitra yang membidangi transisi dan yang telah menggunakan Transisi Energi serta Produsen atau Asosiasi yang berkaitan dengan mobil listrik dan mengunjungi spot-spot yang menggunakan mobil listrik;
 - d. Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI akan mengundang Persatuan Insinyur Seluruh Indonesia; akan rapat internal panja transisi energi ke listrik;
 - e. Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI akan mengundang PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT PGN, Tbk;
 - f. Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja dg kementerian BUMN dan Kemenkop untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam transisi energi.

4. Rapat Intern Panja Distribusi Pupuk Komisi VI DPR RI pada tanggal 16 November 2022, pembahasan mengenai penetapan program kerja Panja Distribusi Pupuk, dengan kesimpulan antara lain :
 - a. Panja Distribusi Pupuk Komisi VI DPR RI menetapkan Aria Bima sebagai Ketua Panja Distribusi Pupuk Komisi VI DPR RI;
 - b. Panja Distribusi Pupuk Komisi VI DPR RI telah menetapkan program kerja dan jadwal kegiatan Panja yaitu mengadakan rapat dengan PT Pupuk

Indonesia (Persero) serta distributor dan pengecer pupuk di lini 1 dan lini 2, untuk pupuk bersubsidi dan non subsidi.

B. RAPAT KERJA/RDP/RDPU/PANJA KOMISI VI DPR RI

Rapat menyetujui pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023, Komisi VI DPR RI untuk menjadwalkan Rapat Kerja/RDP/RDPU/Panja sebagai berikut :

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN II Kementerian BUMN pada tanggal 1 November 2022, dengan pembahasan laporan dan persetujuan anggaran PMN TA 2022

2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI pada tanggal 5 Desember 2022 pembahasan mengenai evaluasi pelaksanaan kinerja kementerian BUMN Tahun 2022, evaluasi pencapaian kinerja BUMN tahun 2022 dan rencana aksi pembinaan BUMN tahun 2023, dengan kesimpulan antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian BUMN RI yang telah berhasil membuat vaksin booster IndoVac (vaksin buatan BUMN Indonesia) dalam rangka mengurangi ketergantungan impor dan diharapkan vaksin IndoVac ini tidak hanya dapat memenuhi pasokan kebutuhan nasional, tetapi juga bisa ekspor ke negara lain.
 2. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN RI dalam rangka penyederhanaan rantai nilai energi guna meningkatkan investasi sektor kelistrikan dan meningkatkan kehandalan *supply* listrik untuk terwujudnya energi bersih melalui transformasi Organisasi Holding dan Subholding PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
 3. Komisi VI DPR RI mendukung Kementerian BUMN RI dalam rangka berinovasi mengembangkan ekonomi kreatif guna mendukung UMKM dan kebudayaan daerah dalam mempercepat pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan aset BUMN yang belum optimal.

4. Komisi VI DPR RI mendukung Kementerian BUMN RI dalam rangka berkontribusi mendorong penciptaan lebih dari 45 Juta Lapangan Kerja bagi Masyarakat Indonesia.
 5. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI agar menyusun rencana peran serta di dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
 6. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN RI untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMN secara berkala, sehingga penurunan kinerja operasional dan keuangan akan terdeteksi sejak dini.
 7. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN RI untuk mengontrol penggunaan dana PMN yang diberikan kepada BUMN sehingga dana PMN yang diberikan digunakan sesuai peruntukannya.
 8. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN RI untuk mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan RUU BUMN.
 9. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
3. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN I pada tanggal 7 Desember 2022, pembahasan mengenai Rencana IPO Tahun 2023 yaitu PT Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina Hulu Energy, Palm Co, dan PT Pupuk Kalimantan Timur, dengan kesimpulan antara lain :
1. Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan dari Kementerian BUMN RI terkait dengan kinerja positif Perusahaan BUMN Klaster Wakil Menteri 1 berkat tingginya harga komoditas dan transformasi perusahaan serta meminta Kementerian BUMN RI untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan BUMN dalam rangka mencapai target kinerja sampai dengan akhir tahun 2022 dan akan melakukan pendalaman lebih lanjut.
 2. Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan dari Kementerian BUMN RI terkait rencana aksi korporasi *Initial Public Offering* (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina Hulu Energy, Palm Co., dan PT Pupuk Kalimantan Timur pada tahun 2023 dan akan melakukan pendalaman lebih lanjut.

3. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN RI untuk memberikan argumentasi konstitusional dan urgensi rencana aksi korporasi IPO PT Pertamina Hulu Energi.
 4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI, PT Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina Hulu Energi, Palm Co., dan PT Pupuk Kalimantan Timur untuk memastikan *timeline*, harga valuasi, pemilihan manajerial dan strategi mitigasi risiko perusahaan yang tepat dalam rangka rencana IPO yang akan dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2023 agar target kebutuhan *Capex* dapat terpenuhi.
 5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN RI, PT Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina Hulu Energi, Palm Co., dan PT Pupuk Kalimantan Timur untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
4. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI pada tanggal 14 Desember 2022, pembahasan mengenai kinerja kementerian Investasi dan BKPM, dan target investasi sampai dengan Desember 2022, kesimpulan antara lain:
1. Komisi VI DPR RI menerima paparan Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI terkait dengan kinerja kementerian dan realisasi target investasi tahun 2022 sampai pada bulan September 2022 sebesar Rp 892,4 Trilyun atau 74,4% dari target Presiden RI sebesar Rp 1200 Trilyun dan meminta kementerian untuk meningkatkan kinerja agar target realisasi penyerapan anggaran dan realisasi investasi tahun 2022 dapat tercapai.
 2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/ BKPM RI untuk menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan negara G20 dalam bidang investasi pada pertemuan *Trade, Investment and Industry Ministerial Meeting* (TIIMM) agar realisasi investasi PMA dapat meningkat.
 3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/ BKPM RI untuk menyusun strategi dan mitigasi yang matang serta melakukan koordinasi

dengan Kementerian/Lembaga pemerintah lainnya dalam mengajukan banding sengketa larangan ekspor nikel di WTO agar program pemerintah terkait hilirisasi industri bahan mineral mentah dapat dilanjutkan.

4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/ BKPM RI untuk mengoptimalkan sistem OSS-RBA (*Online Single Submission - Risk Base Licensing Approach*) khususnya bagi UMKM dengan cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi selama ini.
 5. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/ BKPM RI untuk menyusun langkah-langkah dan strategi yang antisipatif dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang dapat mempengaruhi capaian target investasi pada tahun 2023.
 6. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi/BKPM RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
5. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Ketua BPKN pada tanggal 3 November 2022. Pembahasan mengenai perlindungan konsumen kasus susu formula dan obat sirup untuk anak, Kesimpulan antara lain :
1. Komisi VI DPR RI menyatakan prihatin dan menyesalkan kejadian gagal ginjal akut pada anak dan menyampaikan duka cita yang mendalam atas banyaknya korban jiwa, serta mendesak pemerintah agar ada pemenuhan hak bagi korban dan kejadian seperti itu tidak terulang lagi.
 2. Komisi VI DPR RI mendesak Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI untuk berperan maksimal dalam rangka menerima laporan dan pengaduan masyarakat, serta aktif membela hak-hak konsumen yang telah dirugikan baik secara materiil maupun jiwa, terkait kasus susu formula dan obat sirup yang bermasalah untuk anak.
 3. Komisi VI DPR RI mendesak Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI agar membuka posko pengaduan baik secara online maupun offline dalam jangka waktu 1 X 24 jam, dalam rangka mengadvokasi hak-hak konsumen terkait kasus susu formula dan obat sirup yang bermasalah untuk anak.

4. Komisi VI DPR RI mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar segera mengklarifikasi dan mengumumkan merk-merk susu formula yang tercemar *Enterobacter Sakazaki* dan penegakan aturan terkait peredaran susu formula bayi.
5. Komisi VI DPR RI mendesak Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI agar lebih meningkatkan sinergi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BPKN dalam melakukan perlindungan konsumen/masyarakat.
6. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI untuk memberikan jawaban tertulis dengan lebih detail dan dapat dipertanggungjawabkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Catatan :

Komisi VI DPR RI akan mengajukan kepada Pimpinan DPR RI untuk melakukan Rapat Gabungan antara Komisi VI DPR RI dengan Komisi IX DPR RI menghadirkan Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Perdagangan RI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI terkait kasus gagal ginjal akut akibat obat sirup yang bermasalah untuk anak.

6. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, pada tanggal 9 November 2022, pembahasan mengenai pendalaman PMN Tunai TA 2022 dan rencana aksi korporasi 2022. Kesimpulan antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI memahami dan menerima penjelasan dari Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk., terkait pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.976.000.000.000,- (*Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Rupiah*).

2. Komisi VI DPR RI memahami dan menerima penjelasan terkait rencana pelaksanaan *Right Issue* Publik sebesar Rp 1.898.000.000.000,- (*Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Rupiah*).
 3. Komisi VI DPR RI meminta Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk., untuk benar-benar menyiapkan strategi yang tepat terkait rencana *Right Issue* dengan mempertimbangkan faktor target penyerapan dana publik dan jika *Right Issue* tidak tercapai, maka PT Adhi Karya (Persero) Tbk, diminta untuk menyiapkan langkah dan pilihan lain.
 4. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk, untuk memberikan jawaban tertulis dengan lebih detail dan dapat dipertanggungjawabkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
7. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT KAI (Persero) dan Dirut PT KCIC pada tanggal 9 November 2022, pembahasan mengenai tambahan PMN Tunai tahun 2022. Kesimpulan antara lain :
1. Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Kereta Cepat Indonesia China bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki keterbatasan dalam pembiayaan *cost overrun* dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sehingga membutuhkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2022 sebesar Rp. 3,2 T (*Tiga Koma Dua Triliun Rupiah*) yang berasal dari cadangan investasi Tahun 2022 dalam rangka pemenuhan permodalan porsi Indonesia atas *cost overrun* proyek KCJB tersebut.
 2. Komisi VI DPR RI mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Kereta Cepat Indonesia China untuk menyusun strategi mitigasi risiko atas pelaksanaan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung dan memastikan bahwa dengan tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun 2022 sebesar Rp. 3,2 T (*Tiga Koma Dua Triliun Rupiah*) proyek Kereta

Cepat Jakarta Bandung dapat selesai tepat waktu sesuai dengan *timeline* dan *key milestone* yang telah dipaparkan (beroperasi pada Juni 2023).

3. Komisi VI DPR RI meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyerahkan perubahan studi kelayakan Proyek KCJB sesuai dengan Peraturan Presiden No. 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No.107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
 4. Seluruh informasi yang diterima akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan persetujuan alokasi PMN Tahun 2022 kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI.
 5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Kereta Cepat Indonesia China untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
-
8. Rapat Dengar Pendapat Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI dengan PT Pertamina Hulu Rokan pada tanggal 14 November 2022, pembahasan mengenai kinerja Hulu Rokan. Kesimpulan adalah sebagai berikut :
 1. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI mengapresiasi PT Pertamina Hulu Rokan yang sudah berkontribusi ke Negara dengan wilayah kerja Rokan dari Agustus 2021 s.d September 2022 sebesar Rp.40,8 Triliun yang mencakup Pendapatan Bagian Negara, PPh Pegawai dan PPh PotPut Rekanan, PPN Pemungut, PPh Badan, Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan.
 2. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina Hulu Rokan agar melaksanakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan memastikan target \pm 580 sumur dengan target lifting semaksimal mungkin mendekati 180 ribu barel minyak perhari (BOPD) tercapai pada akhir Desember 2022.
 3. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI mendukung PT Pertamina Hulu Rokan agar sejalan dengan *Good Corporate Governance (GCG)* bersikap tegas dan tepat waktu, termasuk jika harus memberikan sanksi kepada vendor-vendor yang terbukti wanprestasi.

4. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina Hulu Rokan agar mereview harga kontrak kegiatan penunjang produksi sesuai dengan harga pasar dan menyelesaikan permasalahan di Pertamina Hulu Rokan yang ditemukan dilapangan.
 5. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Pertamina Hulu Rokan untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan anggota Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI.
9. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Perum Perumnas pada tanggal 15 November 2022, pembahasan mengenai Pendalaman PMN Tunai TA 2022 dan menghasilkan kesimpulan rapat antara lain :
1. Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari Direktur Utama Perum Perumnas terkait dengan pengajuan PMN tahun anggaran 2022 sebesar Rp1,5 Triliun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp1,125 Triliun akan digunakan untuk penyelesaian persediaan 10.867 unit Rumah Tapak;
 - b. Rp443 miliar yang akan digunakan untuk kebutuhan pendanaan pembangunan 2.678 unit Rumah Susun yang tersebar di seluruh Indonesia.
 2. Komisi VI DPR RI mendorong Perum Perumnas untuk melaksanakan langkah-langkah implementasi strategi, transformasi bisnis, kinerja keuangan dan mitigasi risiko agar pemberian PMN Tahun Anggaran 2022 dapat digunakan untuk menciptakan *multiplier effect* bagi stimulus pembangunan ekonomi kawasan, perluasan tenaga kerja dan peningkatan penerimaan perusahaan serta negara.
 3. Komisi VI DPR RI meminta Perum Perumnas untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN RI, Kementerian Keuangan RI dan

Kemenkumham RI agar Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) oleh Presiden RI dan pencairan Dana PMN dapat segera terlaksana.

4. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Perum Perumnas untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

10. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Utama Karya (Persero) pada tanggal 16 November 2022, pembahasan mengenai pendalaman PMN 2022, dan kesimpulan antara lain :

1. Komisi VI DPR RI memahami dan menerima penjelasan dari PT Utama Karya (Persero) terkait Penyertaan Modal Negara dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun 2022 sebesar Rp. 23.850.000.000.000,- (*Dua Puluh Tiga Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah*) untuk penyelesaian beberapa ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
 - b. Tambahan Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun 2022 sebesar Rp. 7.500.000.000.000,- (*Tujuh Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*) yang berasal dari cadangan investasi Tahun 2022 untuk penyelesaian beberapa ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
2. Komisi VI DPR RI meminta PT Utama Karya (Persero) untuk memastikan bahwa penyelesaian proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang dibiayai oleh Penyertaan Modal Negara dapat terselesaikan tepat waktu sesuai dengan *timeline* yang telah dipaparkan.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT Utama Karya (Persero) untuk melibatkan para pelaku usaha setempat khususnya UMKM dalam pengelolaan Jalan Tol Trans Sumatera sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi setempat.

4. Komisi VI DPR RI meminta PT Utama Karya (Persero) untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN RI, Kementerian Keuangan RI, serta Kementerian Hukum dan HAM RI agar Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) oleh Presiden RI dan pencairan dana PMN Tunai Tahun 2022 dapat segera terlaksana.
5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Utama Karya (Persero) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
11. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada tanggal 21 November 2022, pembahasan mengenai Pendalaman PMN Tunai TA 2022 dan pembahasan corporate action.
12. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT BTN Persero Tbk pada tanggal 23 November 2022, pembahasan mengenai Pendalaman PMN Tunai TA 2022.
13. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Wamen BUMN II Kementerian BUMN pada tanggal 23 November 2022. Pembahasan mengenai persetujuan anggaran PMN TA 2022, dengan kesimpulan antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI menyetujui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2022 kepada PT KAI (Persero) sebesar Rp. 3,2 T (*Tiga Koma Dua Triliun Rupiah*) yang berasal dari cadangan investasi APBN Tahun 2022 dalam rangka pemenuhan permodalan porsi Indonesia atas *cost overrun* proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) mengingat PT KAI (Persero) telah menyelesaikan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komite Proyek KCJB atas *cost overrun* Proyek KCJB sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan

Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk memastikan bahwa dengan tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun 2022 kepada PT KAI (Persero) sebesar Rp. 3,2 T (*Tiga Koma Dua Triliun Rupiah*), proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dapat selesai tepat waktu (sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan yaitu Juni 2023), tepat biaya (tidak menimbulkan *cost overrun* lagi), tepat kualitas dan tepat guna (memberikan manfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi).
3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk memastikan tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun 2022 kepada PT KAI (Persero) digunakan sesuai dengan peruntukannya dan mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*.

14. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Biofarma (Persero) pada tanggal 24 November 2022, dengan menghasilkan :

1. Komisi VI DPR RI memahami penjelasan terkait pencapaian kinerja PT Bio Farma (Persero) dan anggota Holding BUMN Farmasi hingga kwartal III tahun 2022 serta mendorong PT Bio Farma (Persero) dan anggota Holding BUMN Farmasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar target yang ditetapkan untuk tahun 2022 ini dan periode-periode selanjutnya dapat tercapai dengan baik.
2. Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja PT Bio Farma (Persero) yang telah berhasil membuat vaksin booster IndoVac, vaksin buatan BUMN Indonesia.
3. Komisi VI DPR RI meminta para Direksi PT Bio Farma (Persero) dan anggota Holding BUMN Farmasi untuk menyampaikan road map serta target-target secara kualitatif maupun kuantitatif terkait pengembangan PT Bio Farma (Persero) dan anggota Holding BUMN Farmasi kedepannya.
4. Komisi VI DPR RI meminta PT Bio Farma (Persero) dan anggota Holding BUMN Farmasi untuk mengurangi ketergantungan obat dan alat kesehatan

dari Luar Negeri, serta menghasilkan bahan baku obat dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati Dalam Negeri.

5. Komisi VI DPR RI meminta PT Bio Farma (Persero) dan anggota Holding BUMN Farmasi paparan tentang kepedulian lingkungan sekitar perusahaan farmasi berada.
6. Komisi VI DPR RI meminta PT Bio Farma (Persero) dan anggota Holding BUMN Farmasi untuk berperan aktif melakukan pengawasan yang ketat dan pemeriksaan terhadap Bahan Baku Obat (BBO), produk jadi obat dan produk jadi sirup yang beresiko mengandung cemaran EG (Etilen Glikol) dan DEG (Dietilen Glikol).
7. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Bio Farma (Persero) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Catatan :

1. Agar mengusulkan untuk adanya Rapat Gabungan Komisi VI DPR RI dengan Komisi IX dan Komisi III dengan mengundang PT Bio Farma (Persero), Kemenkes RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas sisa vaksin Gotong Royong Sinopharm sejumlah 3,2 juta dosis yang akan *expired* tahun 2023 mendatang.
15. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT PLN (Persero) pada tanggal 28 November 2022. Pembahasan mengenai Pendalaman PMN Tunai TA 202.:
16. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 29 November 2022, pembahasan mengenai evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2022 dan rencana kerja BUMN (aksi korporasi)/ inisiatif strategis korporasi tahun 2023 dengan kesimpulan antara lain :
1. Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. terkait perkembangan kinerja perusahaan per

kuartal III tahun 2022 serta meminta PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan dalam rangka mencapai target kinerja sampai dengan akhir tahun 2022.

2. Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. terkait progres *Right Issue* PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. atas akuisisi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. serta meminta PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. untuk memastikan bahwa akuisisi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. dapat menciptakan nilai tambah bagi Semen Indonesia Group.
 3. Komisi VI DPR RI meminta PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. untuk menyusun dan mengevaluasi strategi mitigasi risiko termasuk mengimplementasikan kebijakan operasional dan pemasaran perusahaan yang tepat dalam rangkaantisipasi pelemahan *demand* dan *over supply* semen nasional serta kenaikan harga energi yang dapat berdampak bagi kinerja perusahaan.
 4. Komisi VI DPR RI mendorong PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. untuk melaksanakan inisiatif strategis perusahaan tahun 2023 secara efektif dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan termasuk meningkatkan *market share* dan menaikkan *brand equity* Semen Indonesia Group secara nasional.
 5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
17. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Krakatau Steel (Persero) Tbk pada tanggal 29 November 2022, pembahasan mengenai evaluasi pelaksanaan kinerja korporasi tahun 2022 dan rencana kerja/inisiatif strategis korporasi tahun 2023, kesimpulan antara lain :
18. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 5 Desember 2022, pembahasan

mengenai pendalaman PMN Tunai TA 2022 dan tambahan PMN 2022 serta progress penyelesaian Garuda.

19. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping pada tanggal 7 Desember 2022, Pembahasan mengenai persiapan distribusi BBM menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Dengan kesimpulan antara lain :

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi atas persiapan yang telah dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga dan PT Pertamina International Shipping terkait persiapan distribusi BBM menjelang Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.
2. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina Patra Niaga dan PT Pertamina International Shipping melalui Satuan Tugas (SATGAS) yang melibatkan Tim Holding-Subholding Pertamina serta instansi terkait untuk mengantisipasi lonjakan arus orang dan barang serta memastikan ketersediaan BBM & LPG selama Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, khususnya pada daerah yang merayakan Natal.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina Patra Niaga dan PT Pertamina International Shipping untuk mengantisipasi potensi bencana alam yang dapat mengganggu kelancaran penyaluran BBM & LPG di masing-masing Regional dengan melakukan mitigasi dan simulasi Tim Tanggap Darurat Bencana dengan melibatkan seluruh instansi terkait.
4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI, Kementerian ESDM RI dan PT Pertamina (Persero) untuk segera menyelesaikan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang mengatur mengenai kriteria pihak yang berhak mendapatkan BBM Bersubsidi.
5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Pertamina Patra Niaga dan PT Pertamina International Shipping untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

20. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Jasa Raharja dan PT Asuransi Jasindo pada tanggal 8 Desember 2022, Pembahasan mengenai kinerja korporasi PT Jasa Raharja dan PT Asuransi Jasa Indonesia dan produk asuransi gagal panen untuk PT Asuransi Jasa Indonesia

21. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur utama PT KAI (Persero), Direktur utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Direktur utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), Direktur utama PT AP 1, Direktur utama PT AP 2, Direktur utama PT Jasa Marga (persero) Tbk, Direktur utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Direktur Utama Perum DAMRI pada tanggal 14 Desember 2022. Pembahasan mengenai Kesiapan BUMN Transportasi dalam menghadapi Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Dengan kesimpulan antara lain :

1. Komisi VI DPR RI menerima paparan persiapan nataru PT KAI (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT PELINDO (Persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Jasa Marga (Persero)Tbk, PT PELNI (Persero) dan Perum DAMRI dalam menghadapi Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.
2. Komisi VI DPR RI meminta PT KAI (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT PELINDO (Persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Jasa Marga (Persero)Tbk, PT PELNI (Persero) dan Perum DAMRI untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat.
3. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT KAI (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT PELINDO (Persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Jasa Marga (Persero)Tbk, PT PELNI (Persero) dan Perum DAMRI untuk memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Memastikan kelaikan sarana angkutan di semua moda;

- b. Memastikan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap protokol kesehatan di setiap simpul transportasi seperti pelabuhan, bandara, dan stasiun;
 - c. Mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi seperti melakukan rekayasa apabila terdapat kemacetan, memastikan pelayanan cepat dalam upaya memberikan pertolongan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan pada libur natal 2022, tahun baru 2023 dan libur anak sekolah.
4. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT KAI (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT PELINDO (Persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Jasa Marga (Persero)Tbk, PT PELNI (Persero) dan Perum DAMRI untuk melakukan survei pelayanan konsumen selama liburan nataru dan disampaikan dalam rapat evaluasi pasca liburan nataru.
5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT KAI (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT PELINDO (Persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Jasa Marga (Persero)Tbk, PT PELNI (Persero) dan Perum DAMRI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.
22. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI pengecer dan distribusi pupuk pada tanggal 28 November 2022, pembahasan mengenai rantai pasokan distribusi pupuk subsidi dan non subsidi.
23. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Forum Koperasi Indonesia (FORKOPI) pada tanggal 30 November 2022, pembahasan mengenai Permohonan audiensi Forkopi pembahasan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), dengan kesimpulan antara lain :

Forkopi memperkenalkan diri yang mengatakan bahwa Forkopi adalah organisasi yang beranggotakan Koperasi di seluruh Indonesia

Tujuan hadir di Komisi VI DPR untuk mengadukan permasalahan terkait RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) terutama pasal 191 dan 192 yang menyinggung adanya keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada perijinan dan pengawasan koperasi.

II. JALANNYA RAPAT

- Forkopi menyampaikan bahwa istilah Koperasi bermasalah pada 8 Koperasi KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracici Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.

III. TANYA JAWAB

DR. Evita Nursanty, MSc (F. PDIP)

1. Prihatin mendengar masukan bahwa Pengawasan Koperasi akan dilakukan di OJK
2. Koperasi berbeda dengan perusahaan terutama tujuannya berbeda
3. Masukan ini menjadi pendorong revisi UU Koperasi

H. Rudi Hartono Bangun SE, MAP (F. Nasdem)

1. Apresiasi kedatangan anggota Forkopi bahkan dari daerah untuk beraudiensi ke Komisi VI DPR RI
2. Mengingat pernah ikut membahas PPSK 10 tahun lalu ada beberapa catatan yang disampaikan Menkop Teten 1) 120 ribu koperasi di seluruh Indonesia dengan 27 juta jiwa dan asset 250 trilyun dan ada Koperasi yang bermasalah bahkan memiliki kredit macet 26 trilyun
3. Menteri Teten menyatakan jika Bank gagal banjir simpanan nasabah I jamin LPS bagaimana dengan Koperasi

4. Pertanyaannya bagaimana pengawasan jika dilakukan oleh tingkat Deputi di Kemenkop sedang uang dan jangkauan besar seluruh Indonesia?

DR Ir. Harris Turino SH, Msi MM (F. PDIP)

1. Tidak ada niat Jokowi mengerdilkan koperasi tapi saat ini ada produk-produk koperasi yang harus diawasi OJK
2. Hal ini menjadi filosofi dasar pengawasan dilakukan OJK
3. Akan dibawa ke Raker dengan Kementerian Koperasi

IV.KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan dari Forkopi (Forum Koperasi Indonesia) terkait dengan adanya penolakan Forkopi terhadap beberapa pasal di Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) terutama pasal 191 dan 192 terkait keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada perijinan dan pengawasan koperasi.
2. Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan dari Forkopi terkait istilah Koperasi bermasalah pada 8 Koperasi KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Inonesia, yang sebenarnya lebih tepat disebut "Koperasi Palsu" dengan alasan koperasi dimaksud sama sekali tidak menjunjung tinggi asas, prinsip, nilai dan jati diri koperasi.
3. Komisi VI DPR RI akan menyampaikan penjelasan tersebut kepada mitra terkait melalui Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM dalam mendukung upaya bersama mengembangkan koperasi sebagai institusi bisnis dan sosial yang bercirikan asa, prinsip, nilai dan jati diri koperasi serta tidak hanya fokus terhadap profit semata tetapi juga benefit bagi seluruh anggota.

C. KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK/KUNJUNGAN KERJA RESES/KUNJUNGAN KERJA PENGAWASAN LUAR NEGERI KOMISI VI DPR RI

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan kunjungan kerja antara lain :

1. Kunjungan Kerja Spesifik ke kota Bogor terkait pengawasan terhadap kinerja PT Taspen pada tanggal 10-12 November 2022.
2. Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Karawang terkait pengawasan terhadap kinerja Perum Peruri pada tanggal 10-12 November 2022.
3. Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Cikarang terkait pengawasan kinerja PT Kimia Farma, Tbk., pada tanggal 10-12 November 2022.
4. Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pangan Komisi VI DPR RI ke Kota Indramayu dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur pabrik penggilingan dan pengolahan beras modern/Rice mill unit RNI pada tanggal 17-19 November 2022.
5. Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pangan Komisi VI DPR RI ke Kota Sragen Jawa Tengah dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur pabrik penggilingan dan pengolahan beras modern/Rice mill unit Bulog pada tanggal 17-19 November 2022.
6. Kunjungan Kerja Spesifik ke Bali Provinsi Denpasar terkait peninjauan rencana pembangunan KEK kesehatan dan pariwisata bali oleh PT Aviasi Pariwisata (Indonesia) PT Hotel Indonesia Natour dan PT Pertamina Bina Medika pada tanggal 1-3 Desember 2022.
7. Kunjungan Kerja Spesifik ke Bali Provinsi Denpasar terkait peninjauan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di Bali pada tanggal 1-3 Desember 2022.
8. Kunjungan Kerja Spesifik ke project Becakayu PT Waskita Karya (Persero) Tbk di bekasi Jawa Barat pada tanggal 9-11 Desember 2022.
9. Kunjungan Kerja Spesifik ke Bali Provinsi Denpasar terkait peninjauan kinerja operasional perum Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia (Airnav) di Bali pada tanggal 1-3 Desember 2022.

10. Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16-20 Desember 2022
11. Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16-20 Desember 2022.
12. Kunjungan kerja Reses ke Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 16-20 Desember 2022.

IV. **PENUTUP**

Demikian Laporan Kinerja Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022 – 2023.

Jakarta, 20 Desember 2022
**KABAGSET KOMISI VI DPR RI,
TTD.**

DEWI RESMINI, S.E., M.Si
NIP. 19710407 199203 2 001